



**MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA**
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH

**Lembar ke.....
 (untuk*)**

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
 (SPMK)**

Nomor SPMK :(1) Kelompok Belanja :(3)
 No.Register :(2) Tahun Anggaran :(4)

Berdasarkan Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Kanwil DJBC dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Nomor :(5) Tanggal :(6)

BA, Eselon , Kode Satker (7) :

:(8)
MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN : (9)

Untuk membayar kembali/memindahbukukan PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai :

(10)(11)

Tahun.....(12) kepada:

Nama Perusahaan :(13)

Alamat :(14)

NPWP : (15)

NIPER :(16)

Nomor Rekening :(17)

Pada Bank :(18) Kode Bank :(19)

Alamat Bank :(20)

Sejumlah : Rp.(21)

dengan huruf (.....(22)

(BM = Rp. ; Cukai = Rp.)

(23) tgl,
 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 KEPALA KANTOR.....
 u.b.
 KEPALA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI,

 NIP

*) Dicetak sesuai peruntukannya
 Lembar 1 untuk KPPN
 Lembar 2 untuk KPPN
 Lembar 3 untuk Perusahaan
 Lembar 4 untuk Kantor Wilayah
 Salinan sesuai dengan aslinya;
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian T.U. Departemen,

**) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
(SPMK BMC)

NOMOR	URAIAN ISIAN										
1	Diisi Nomor SPMK yang diterbitkan.										
2	Diisi Nomor Register SPMK yang diterbitkan.										
3	Diisi kode Kelompok Belanja.										
4	Diisi Tahun Anggaran SPMK yang diterbitkan.										
5	Diisi Nomor SKPFP BM-C.										
6	Diisi Tanggal SKPFP BM-C.										
7	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (Kantor Wilayah yang bersangkutan). Sebagai contoh: Kantor Wilayah IV Jakarta dengan Kode kantor 040000 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table border="1" style="display: inline-table; margin: 5px;"><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; margin: 5px;"><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; margin: 5px;"><tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	5	0	5	0	4	0	0	0	0
1	5										
0	5										
0	4	0	0	0	0						
8	Diisi dengan uraian Kantor Wilayah yang bersangkutan (misalnya: Kantor Wilayah IV Jakarta).										
9	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya: KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I).										
10	Diisi 6 (enam) digit kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai dengan jenis Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai yang dikembalikan.										
11	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk sesuai dengan kode jenis Pendapatan Bea Masuk yang dikembalikan.										
12	Diisi dengan tahun SPMK yang bersangkutan.										
13	Diisi dengan Nama Perusahaan penerima SPMK yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan Alamat Perusahaan yang bersangkutan.										
15	Diisi kode NPWP Perusahaan Penerima SPMK yang bersangkutan.										
16	Diisi dengan NIPER Perusahaan yang bersangkutan.										
17	Diisi dengan nomor rekening bank Perusahaan yang bersangkutan.										
18	Diisi dengan Nama Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menampung pemindahbukuan dana SPMK.										
19	Diisi dengan Kode Bank.										
20	Diisi dengan Alamat Bank.										
21	Diisi dengan angka jumlah uang yang dikembalikan.										
22	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan.										
23	Diisi cap KPPN “ Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor : ”, dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.										



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
37/PMK.04/2005 TENTANG PEMBAYARAN
FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK
DAN/ATAU CUKAI (SKPPF BM-C)
UNTUK.....

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK
UNTUK.....NIPER.....
PERIODE :S/D.....

HALAMAN :

NOMOR URUT	NOMOR PIB		URAIAN BARANG IMPOR HS/SERI/KODE PIB	NILAI DLM PIB - BM - CUKAI	JML BARANG (SATUAN) - DIMINTA - DISETUJUI	NILAI BM/CUKAI - DIMINTA - DISETUJUI	KETERANGAN
	KODE KANTOR	NOMOR & TANGGAL					
TOTAL :							

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR